

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA GARECCING KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI**



Wahyuningsi

2016.235.01.172

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2019**

S K R I P S I
P E N G E S A H A N

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
GARECCING KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI**

Disusun dan Diajukan Oleh

WAHYUNINGSI

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016.235.01.172

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 14 Agustus 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,



Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si.

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar



Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA GARECCING KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI**

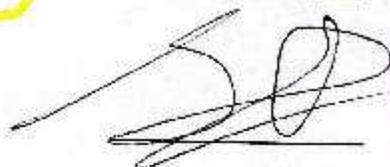
Pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Wahyuningsi** dengan Nomor Pokok 2016.235.01.172

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

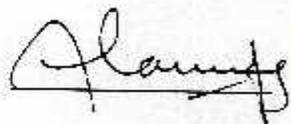
Ketua Tim : Dr. Guntur Karnaeni, M.Si.



Sekretaris : Drs. Sudirman, M.Si.



Anggota : Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si.





No. Dokumen	SMM-FM-AKD-12.09
Revisi	0
Tanggal Efektif	13 Agustus 2018
Halaman	1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya:

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI/TESIS, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1)/MAGISTER (S2) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 19 Agustus 2019
Yang menyatakan,



Wahyuningsi
Wahyuningsi

NPM. 2016-235-01-172

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, ridho dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”**. Tak lupa penulis haturkan salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai sang pemimpin sejati. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dengan berbagai hambatan-hambatan dan tantangan, namun hal tersebut dapat teratasi dengan tekad yang kuat dan sungguh-sungguh, segala upaya dan usaha yang keras serta tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua tercinta, Bapak Baharuddin, S.Pd. dan Ibu Hj. Rosmini Rachman, S.Pd. yang telah mendidik, memberikan semangat, mencurahkan segala doa dan kasih sayang serta dukungan yang luar biasa kepada penulis. Dan juga kepada Bapak Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos, M.Si yang selalu memberikan nasihat, semangat, serta arahan dalam memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan

skripsi ini. Terima kasih atas semua doa, dukungan dan semangat yang telah kalian berikan kepada Penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin, MDA,. Ph.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar (STIA LAN Makassar).
2. Ibu Dr. Najmi Kamariah SE. M.Si selaku Penasehat Akademik
3. Bapak Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos. M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik
4. Dosen STIA LAN Makassar yang telah membagi ilmu pengetahuan kepada menulis, pegawai akademik dan non akademik STIA LAN Makassar yang telah memberikan arahan dan petunjuk perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnan skripsi ini.
6. Bapak Irwan Parenrengi selaku Kepala Desa Gareccing dan seluruh pengurus Desa yang telah banyak memberikan informasi dan masukan dalam penelitian ini.
7. Muhammad Resky, yang telah memberikan support yang luar biasa dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Yang selalu ada disaat susah maupun senang.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang tidak sempat penulis tuliskan

namanya satu-persatu, yang telah begitu banyak membantu dalam proses penyelesaian studi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembacanya pada umumnya.

Wasalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh..

Makassar, Juli 2019

Penulis

INTISARI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA GARECCING KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI

Penulis : Wahyuningsi
Penasehat : Alam Tauhid Syukur

Permasalahan pada penelitian ini untuk mengetahui aspek-aspek terkait dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilihat melalui kegiatan Musrenbang sampai pada tahap evaluasi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Tani, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Tokoh Masyarakat dengan jumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumen.

Hasil penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dengan adanya Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan, Partisipasi Dalam Pelaksanaan, Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat dan Partisipasi Dalam Evaluasi. Partisipasi masyarakat Desa Gareccing dalam pembangunan infrastruktur cukup baik, karena masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran. Hal ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan anggota masyarakat mengetahui dan aktif dalam rangkaian kegiatan pada pembangunan infrastruktur mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi setiap tahap pembangunan yang dijalankan. Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, tumbuh berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
INTISARI.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori.....	10
1. Konsep Administrasi Pembangunan.....	10
a. Sejarah Administrasi Pembangunan	10
b. Pengertian Administrasi Pembangunan	12
c. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan	16
2. Konsep Pembangunan Desa.....	17
a. Pengertian Desa	17
b. Pengertian Pembangunan Desa	19
c. Ciri Ciri Pembangunan Desa.....	22
3. Konsep Partisipasi.....	23
a. Pengertian Partisipasi	23
b. Penumbuhan Partisipasi	28
c. Variabel Penting Dalam Partisipasi	30
d. Bentuk atau tahap Partisipasi.....	33
4. Konsep Partisipasi Masyarakat	34
5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	36
B. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38
C. Kerangka Konsep	40
D. Pertanyaan Penelitian.....	41
BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Desain Penelitian	42
1. Tempat dan Waktu Penelitian	43
2. Tahap Kegiatan Penelitian.....	43
C. Unit Analisis dan Sumber Data	44

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	44
1. Wawancara	45
2. Dokumentasi.....	45
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian.....	48
1. Sejarah Terbentuknya Desa Gareccing.....	48
2. Visi dan Misi Desa Gareccing.....	49
3. Keadaan Geografis.....	50
4. Keadaan Demografis	50
5. Struktur Organisasi Desa Gareccing	54
B. Karakteristik Sumber Data	61
C. Paparan dan Reduksi Data	62
D. Hasil Analisis Data	63
BAB V PEMBAHASAN.....	94
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tahap Kegiatan Penelitian.....	43
Tabel 2	Kepala Desa Yang Pernah Memimpin di Desa Gareccing Tahun 2002-2019.....	50
Tabel 3	Keadaan Penduduk Berdasarkan Jumlah Penduduk	52
Tabel 4	Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharaan	53
Tabel 5	Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konsep	40
Gambar 2	Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Gareccing	55
Gambar 3	Daftar Hadir Musrenbang Tahun 2018	68
Gambar 4	Kehadiran Rapat	69
Gambar 5	Diskusi	74
Gambar 6	APBD Desa Gareccing Tahun 2018	81
Gambar 7	Tanggul/Talud Irigasi Suplesi Balangpangi	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar pembangunan berjalan dengan efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan juga peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ke khasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan pesaing global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kemakmuran rakyat, kesehatan dan pendidikan yang tinggi, sehingga memungkinkan mutu kehidupan kenegaraan meningkat, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintah dan koordinasi masyarakat secara

efektif dan efisien. Dewasa ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan nasional. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung beragam mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah.

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Sebab, merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat Desa, maka program perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta evaluasi pembangunan

harus melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat Desa. Antara partisipasi masyarakat Desa dengan kemampuan masyarakat Desa untuk berkembang secara mandiri. Kesiapan masyarakat untuk untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam sebuah pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, persepsi yang fundamental pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokratis.

Dengan demikian, partisipasi tidak hanya ikut-ikutan, tetapi melainkan mengambil peranan terutama dalam mengontrol lembaga-lembaga yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan. Dalam mewujudkan partisipasi tersebut, pemerintah telah membentuk sebuah forum yang digunakan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan, yang dikenal dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Sebagai mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat *bottom-up planning*. Musrenbang ini dimulai dari satuan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tingkat Kelurahan/Desa dan kemudian secara hirarki naik ke atas yaitu tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota.

Peran pemerintah Desa sudah dikatakan baik terutama dalam masalah pembangunan Desa, dimana pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya agar pembangunan di Desa dapat berkembang dan

menuju kearah yang lebih baik melalui berbagai macam cara, seperti melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan Musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca Musrenbang. Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan Nasional dan daerah di Indonesia.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya di Desa-Desa diselenggarakan Musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran seperti ini akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah Desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat.

Keterbukaan dan tanggung jawab kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah Desa. Hal ini sejalan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Desa, yaitu Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 74). Masyarakat Desa seharusnya mengetahui pentingnya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan), khusus tingkat Desa karena keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang sangat dibutuhkan untuk mensinergiskan rencana pembangunan Desa. Hal ini diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Didalam forum Musrenbang itu pula masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah Desa guna untuk kemajuan dan pembangunan Desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban masyarakat Desa dalam hal ini adalah pentingnya masyarakat mengetahui bahwa masyarakat berhak mengikuti kegiatan Desa, yaitu Musrenbang yang diperkuat oleh Undang-Undang tersebut. Dimana dikatakan masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran, pendapat, tentang kegiatan penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasinya dalam Musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) namun juga mengawasi. Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tapi masyarakat diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan bahkan dalam pengawasan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Di dalam pelaksanaan tersebut diartikan bahwa ketika hasil Musrenbang sudah ditetapkan pada tahun yang telah ditentukan, maka dalam pelaksanaan masyarakat bergotong-royong untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan tersebut demi pembangunan Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Begitu juga dengan pengawasan, maka masyarakat berhak mengawasi program yang telah ditetapkan didalam hasil Musrenbang, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak dan diperkuat lagi dengan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 tentang hak dan kewajiban masyarakat Desa bahwa masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desanya. Keterlibatan masyarakat di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten

Sinjai untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, terutama dilihat dari berbagai tahapan penyusunan rencana pembangunan melalui mekanisme Musrenbang pada tingkat Desa relatif baik. Data yang diperoleh dari daftar hadir dalam rapat pertemuan Musrenbang pada tingkat Desa, menggambarkan bahwa antusiasme tokoh masyarakat yang diundang dalam Musrenbang tergolong masih rendah, seperti yang dikatakan oleh Bendahara Desa, yang hadir hanya perangkat Desa, BPD, Kepala Dusun, RT, RW, untuk RT tidak semua RT yang bisa hadir, sedangkan masyarakat hanya beberapa orang saja. Undangan di buat untuk 50 orang, namun dari masyarakat yang datang hanya beberapa orang saja.

Jadi, ketika rapat di balai Desa semua yang hadir termasuk Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, Kepala Dusun, RT, RW serta masyarakat, dari semua yang hadir baik itu pemerintah Desa, BPD, dan tamu undangan serta masyarakat semuanya berjumlah 31 orang, dari jumlah 31 orang tersebut masyarakatnya hanya 5 orang saja, selebihnya pemerintah Desa dan undangan dari Kecamatan. Jadi asumsi sementara peneliti, partisipasi masyarakat tergolong masih rendah. Selain itu, masih minimnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang rencana musyawarah kegiatan Musrenbang, sehingga kurang mengakomodir kepentingan masyarakat. Dengan adanya BPD dan RT masyarakat merasa sudah terwakili, jadi banyak masyarakat yang memutuskan untuk tidak hadir dalam rapat Musrenbang, yang seharusnya masyarakat hadir karena masyarakat memiliki hak dalam menyampaikan aspirasi, pendapat bahkan

mengawasi penyelenggaraan Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, dari hasil pra penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan data hasil Musrenbang dari tahun 2017 sampai 2019. Data tersebut berupa usulan Rencana Kerja Desa dari tahun 2017 sampai 2019. Data ini berguna untuk memperkuat alasan peneliti memilih lokasi Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Dari data tersebut, peneliti dapat melihat penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa, karena setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai 2019 banyak usulan yang tidak dilaksanakan oleh Desa. Asumsi peneliti, ketika usulan RKPDes banyak tapi pelaksanaannya hanya sedikit, maka masyarakat menjadi tidak mau dan malas mengikuti Musrenbang, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilihat melalui kegiatan Musrenbang sampai pada tahap evaluasi dengan mengambil judul: **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Manajemen Pembangunan Daerah serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi upaya penelitian sejenis dan lebih mendalam pada masa yang akan datang.
- b) Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sejauh mana teori-teori yang didapatkan selama masa perkuliahan dengan fakta yang ada saat melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada pembangunan di Kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Administrasi Pembangunan

a. Sejarah Administrasi Pembangunan

Pengamatan yang cermat atas pertumbuhan dan perkembangan administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmiah yang relatif baru menunjukkan bahwa usaha para pakar untuk mengembangkan teori administrasi pembangunan sesungguhnya telah mulai setelah Perang Dunia II berakhir yang kemudian berlanjut secara lebih intensif pada dekade enam puluhan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, timbul pola baru dalam hubungan antar bangsa di dunia Afifuddin (2010: 57-59).

1. Terdapat negara-negara yang menang pada Perang Dunia tersebut yaitu negara-negara sekutu dan di pihak lain ada negara-negara yang kalah. Salah satu akibat negatif dari suatu peperangan ialah morat-maritnya kehidupan perekonomian, yang tentunya lebih terasa di negara-negara yang kalah dibandingkan di negara-negara yang menang. Kenyataan tersebut terlihat dengan jelas sebagai salah satu dampak negatif dari Perang Dunia II tersebut. Akan tetapi sejarah telah membuktikan bahwa karena berbagai pertimbangan termasuk pertimbangan politik, ekonomi, dan kemanusiaan negara-negara yang menang kemudian menunjukkan hasrat atau keinginan untuk membantu negara-negara yang sangat menderita akibat berkecamuknya perang, termasuk negara sekutu yang menang maupun musuhnya yang kalah.
2. Pola kedua yang timbul dalam hubungan antar negara ialah bahwa di satu pihak terdapat negara-negara bekas penjajah dan di pihak lain terdapat negara-negara baru, yaitu bekas jajahan yang memperoleh kemerdekaannya dengan berbagai cara, seperti melalui perang kemerdekaan dan atau melalui meja perundingan. Sebagaimana diketahui, negara-negara baru yang memperoleh

kemerdekaannya se usai Perang Dunia II itu hampir seluruhnya terdapat di Benua Asia dan Afrika, meskipun terdapat negara-negara lain yang tergolong miskin di Amerika Latin dan sekitar Laut Karibia yang kesemuanya ingin maju dan berkembang sebagai negara yang kuat.

Wahana untuk itu ialah dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan. Tanpa terkecuali, semua negara bekas penjajah itu telah menjadi negara maju dan relatif kaya dan meninggalkan rakyat di wilayah jajahannya dalam keadaan miskin dan terbelakang dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang politik, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu fenomena yang yang tampak dalam hubungan antarnegara ialah bahwa negara-negara bekas penjajah ingin memelihara hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara jajahannya.

Para pragmatis akan mengatakan walaupun negara-negara bekas penjajah bersedia memberikan bantuan kepada negara-negara bekas jajahannya, sesungguhnya dasarnya bukanlah karena sikap altruistik dan bukan pula karena landasan moralitas, melainkan juga karena kepentingan nasional. Penjajahan yang dianggap sebagai sumber utama keterbelakangan. Akibat dari penjajahan yang lama, kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensinya menjadi tertekan, sebagai contoh di bidang ekonomi tidak tercipta pemupukan modal dalam perekonomian karena hampir seluruh keuntungan kegiatan ekonomi telah disalurkan ke negeri induk penjajah.

Terlepas dari benar tidaknya pandangan tersebut dan kuat lemahnya argumentasi yang digunakan membela pandangan tertentu, tapi yang

jelas adalah bahwa pemberian bantuan dalam berbagai bentuk dari negara maju ke negara yang sedang membangun merupakan fenomena aktual yang pada gilirannya mendorong percepatan berkembangnya ilmu Administrasi Pembangunan.

b. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Perkembangan administrasi pembangunan, baik dalam tataran teoritik maupun dalam praktik, mengikuti perkembangan pemikiran studi administrasi, khususnya administrasi negara dan administrasi pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk memahami administrasi pembangunan perlu dimulai dengan pemahaman mengenai administrasi dan pembangunan.

Definisi administrasi pembangunan dilihat dari tata bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu: administrasi dan pembangunan, yang masing-masing memiliki makna yang berbeda. Secara umum, pengertian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan dengan membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai

kesejahteraan rakyat. Definisi administrasi pembangunan menurut Siagian (Listyaningsih, 2014:18) yaitu:

Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Menurut Mustopadidjaya (Afifuddin, 2010: 51) administrasi pembangunan adalah: "Ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien". Kemudian masih dalam buku yang sama, menurut Riggs (Afifuddin, 2015: 52): "administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program, atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan".

Untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien harus dilakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan harus ada fungsi pengawasan yang dilakukan. Sedangkan menurut Tjokroamodjojo (Listyaningsih, 2014: 18) administrasi pembangunan diartikan:

sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara (pemerintah) untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Dari definisi yang disampaikan oleh para ahli mengenai administrasi pembangunan, kemudian Siagian (Listyaningsih, 2014: 18) menyimpulkan bahwa terdapat tujuh ide pokok dalam administrasi pembangunan antara lain:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independent akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensi. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu kejangka waktu yang lain.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional.
7. Semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Konsep pembangunan merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifatnya

dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi pemerintah, sistem manajemennya dan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya. Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dianggap berhasil, harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakannya.

Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan pasar. Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung misalnya pembangunan TK dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak secara langsung terlihat membawa peningkatan kesejahteraan warga Desa karena dampaknya akan terlihat setelah murid tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik (Wibawa, 2009: 7).

c. Ruang lingkup Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan tidak lain adalah administrasi negara yang juga lebih ditujukan untuk mendukung proses pembangunan. Dengan demikian ruang lingkup administrasi pembangunan adalah penyempurnaan administrasi negara dan penyempurnaan administrasi bagi penyelenggaraan proses pembangunan. Sehingga menurut Tjokroamidjojo (Listyaningsih, 2014: 20) secara sederhana administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi antara lain:

1. ***The Development of Administration*** yaitu penyusunan kebijakan penyempurnaan Administrasi Negara, yang meliputi:
 - a. Penyempurnaan dan pendayagunaan organisasi bagi pembangunan (organisasi-organisasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan).
 - b. Pendayagunaan kepegawaian (pengadaan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan).
 - c. Pendayagunaan ketatalaksanaan (masalah organisasi dan tata laksana termasuk prosedur dan tata kerja)
2. ***The Administration of Development*** yaitu perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif, meliputi:
 - a. Administrasi perencanaan dan pemograman pembangunan (misalnya kemampuan dan mekanisme analisa dan pembentukan kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran).
 - b. Administrasi pembiayaan pembangunan (penyaluran biaya untuk berbagai macam kegiatan pembangunan yang berbeda-beda sifatnya).
 - c. Administrasi program dan dan proyek pembangunan termasuk berbagai cara koordinasinya.
 - d. Sistem pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dari uraian diatas, menjelaskan bahwa ruang lingkup administrasi pembangunan meliputi pada perangkat pelaksanaan pembangunan serta bagaimana cara melaksanakan pembangunan. *The development of administration* membahas bagaimana mempersiapkan perangkat

pembangunannya yang dimulai dari pendayagunaan organisasi, aparatur dan tata laksananya. Seiring dengan bertambahnya masalah yang terjadi di pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, seperti korupsi, nepotisme, pelayanan yang buruk dan lain sebagainya, maka sangat tepat bila dilakukan reformasi birokrasi dan reformasi administrasi.

Sementara *the administration of development* membahas mengenai bagaimana pembangunan itu dilaksanakan meliputi perumusan kebijakan dan program-program pembangunan. Kegiatan ini meliputi administrasi perencanaan pembangunan, implementasinya, sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan. Dari uraian ruang lingkup administrasi pembangunan di atas jelas bahwa administrasi pembangunan mempunyai kaitan erat dengan administrasi negara, bahkan administrasi pembangunan saling mempengaruhi dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kelembagaan.

2. Konsep Pembangunan Desa

a. Pengertian Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Tentang Desa pada Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan :

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi dapat dikatakan bahwa Desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Di mana sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung/dusun/banjar/jorong. Selain itu terdapat Tipologi Desa seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Tentang Desa pada Bab 1 Pasal 1 yaitu :

Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

Tipologi Desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri berdasarkan Permendesa No. 16 Tahun 2018, yaitu :

1. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
2. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
3. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan

mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

5. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

b. Pengertian Pembangunan desa

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Menurut Sudirwo, (1981: 63) Pembangunan desa adalah:

Proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.

Pembangunan Desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan Desa itu,

pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan Desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan :

- 1) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- 3) Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 78 ayat 1 adalah:

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat 2, bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari:

1. Perencanaan

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana disusun secara berjangka meliputi:
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- f. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- g. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan

- a. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- b. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

- c. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
 - d. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
 - e. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
3. Pengawasan
- a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
 - e. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

c. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan Desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian Desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan Desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan Desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan

dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan Desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Kansil (1983: 251) yaitu:

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk Desa-Desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan Desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.
6. Pembangunan Desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

3. Konsep Partisipasi

a) Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah “sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta”. Maksud partisipasi di sini adalah keikutsertaan, peran serta, atau keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Berikut beberapa pengertian menurut beberapa para ahli, yaitu:

- 1) Menurut Wazir (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.
- 2) Partisipasi masyarakat menurut Adi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
- 3) Soekanto (1983: 245) menegaskan bahwa partisipasi adalah pinjaman dari bahasa Belanda "*participatie*", yang sebenarnya dari bahasa latin "*participatio*". Perkataan "*participatio*" terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu "*part*" yang berarti bagian, dan "*capere*" yang berarti mengambil bagian. Selanjutnya, kata "*participation*" itu sendiri berasal dari kata kerja "*participate*" yang berarti ikut serta. Jadi, partisipasi mengandung pengertian aktif yakni adanya kegiatan atau aktivitas. Pengertian partisipasi menurut asal usul kata sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto dapat dipahami bahwa partisipasi merupakan suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau peran dalam suatu kegiatan bersama.
- 4) Tjokrowinoto (1993: 48) menegaskan bahwa partisipasi secara aktif dalam pembangunan di lingkungan masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan bahkan sudah menjadi mitos dari pembangunan itu sendiri, sehingga hampir semua negara mengumumkan secara luas kebutuhan partisipasi dalam semua proses pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memberikan kontribusi kepada kegiatan bersama dengan maksud dan tujuan untuk mencapai tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan dalam berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan kreatifitas yang ada dalam pola pikir dan mata hati mereka, yang akan disampaikan dalam musyawarah desa (disebut juga "Rapat Desa").
- 5) Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Berdasarkan beberapa pengertian partisipasi masyarakat seperti yang telah diungkapkan maka penulis berpendapat bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan kontribusi aktif secara fisik dan mental dalam berbagai kegiatan bersama, sebagai realisasi akan hak dan kewajiban setiap warga Negara dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, setiap berbicara partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari:

- 1) Ada keterlibatan dan kontribusi aktif
- 2) Secara fisik dan mental
- 3) Dalam kegiatan bersama
- 4) Menunaikan hak dan kewajiban
- 5) Mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena pentingnya partisipasi atau dukungan atau kontribusi atau keikut-sertaan masyarakat maka partisipasi menjadi kunci segala sesuatu, termasuk sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan. Apabila partisipasi ada di manamana dan dilakukan oleh banyak orang maka tidak ada pekerjaan yang tidak sukses. Di sisi lain, hasil bisa lebih optimal, semua biaya menjadi lebih ringan, pekerjaan akan menjadi lebih lancar, sekaligus partisipasi dalam hal ini akan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap hasil pekerjaan. Berikut beberapa pengertian partisipasi menurut ahli, yaitu:

- 1) Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi (2010: 201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.
- 2) Sedangkan Sumaryadi (2010: 46) mengemukakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Menurut Sundariningrum (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- 1) Partisipasi Langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- 2) Partisipasi tidak langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Dwiningrum (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Menurut Simatupang (Yuwono, 2001: 124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- 1) Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- 2) Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama

untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

Hetifah (Handayani 2006: 39) berpendapat bahwa: "Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal". Sedangkan Suryono (2001: 124) berpendapat: "partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan". Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan secara sukarela dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Partisipasi juga berarti keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

b) Penumbuhan Partisipasi

Conyers (1991: 154-155) menegaskan bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa adanya ini maka program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- 3) Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri, yaitu masyarakat mempunyai

hak dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah mereka.

Pandangan Conyers ini dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pendapat ini apabila dihubungkan dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dapat diperoleh pemahaman bahwa partisipasi masyarakat yang baik bukan hanya sekedar dilihat dari kehadirannya. Dalam kehadiran mereka tersebut dapat memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat melalui usulan-usulan yang diajukannya dan permasalahan masyarakat di lingkungannya. Di sisi lain, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam persiapan dan perencanaan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, sekaligus mereka secara langsung maupun tidak langsung telah menggunakan hak-hak demokrasinya seperti hadir dalam pengambilan keputusan dan berbicara dalam Musrenbangdes. Persoalannya adalah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dari waktu ke waktu menunjukkan tren yang makin menurun.

Sanof (Indrawijaya 2011: 61) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan konsep yang sangat umum yang meliputi berbagai bentuk pengambilan keputusan oleh sejumlah kelompok yang terlibat. Sedangkan tujuan dari partisipasi menurut Sanof (Indrawijaya 2011: 62) mengatakan bahwa tujuan utama dari peran serta masyarakat adalah:

- 1) Melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kepercayaan mereka, sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam sistem yang telah ada ketika mereka menghadapi suatu masalah.

- 2) Menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan (kualitas) dari perencanaan dan keputusan.
- 3) Meningkatkan rasa kebersamaan (*sense of community*) dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa catatan yang telah diungkapkan dapat ditegaskan bahwa ada beberapa hal mendasar yang perlu disikapi dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Dibangunnya ruang atau wahana partisipasi masyarakat
- 2) Penerapan pendekatan pembangunan yang partisipatif
- 3) Ada keteladanan pemimpin formal maupun informal, sekaligus berfungsi sebagai motivator
- 4) Partisipasi sebagai hak dan kewajiban yang dijadikan budaya bagi masyarakat
- 5) Kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat betul betul merupakan kegiatan yang menjadi kebutuhan mereka
- 6) Kolaborasi Sumber pendanaan dan
- 7) Pemberian penghargaan

c) Variabel Penting Dalam Partisipasi

Banyak faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi partisipasi seseorang atau sekelompok atau suatu masyarakat dalam kegiatan atau aktivitas bersama. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam hal ini dapat dikelompokkan ke dalam (dua) hal yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal terdiri dari: (1) Aktor penggerak, (2) Wahana yang tersedia, (3) Sumber dana kegiatan, (4) Pemilik kegiatan dan (5) Manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh warga atau

masyarakat, sedangkan faktor internal terdiri dari: (1) Tingkat ekonomi warga atau masyarakat, (2) Tingkat pendidikan warga atau masyarakat, (3) Tingkat pemahaman warga atau masyarakat terhadap kegiatan bersama, (4) Tingkat kepedulian warga, (5) Rasa ego, (6) Rasa memiliki warga (7) Jenis kelamin, dan (8) Tingkat Umur. Menurut Ngusmanto (2015:140) ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi, yaitu:

1) Faktor Eskternal

a) Aktor penggerak

Setiap kegiatan bersama akan mencapai hasil yang optimal apabila ada dukungan atau kontribusi warga atau anggota masyarakat. Tinggi dan rendah atau aktif dan tidak aktif partisipasi atau kontribusi warga dipengaruhi oleh adanya aktor penggerak. Dalam realitas, memang ada partisipasi warga yang tumbuh karena kesadaran sendiri untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Sungguh pun begitu, partisipasi yang tumbuh karena kesadaran sendiri umumnya hanya dilakukan oleh sedikit warga atau jumlah mereka tidak banyak.

b) Wahana yang tersedia

Wahana dalam hal ini bermakna seberapa besar peluang atau kesempatan yang tersedia bagi warga untuk berpartisipasi. Peluang ini sangat dipengaruhi oleh sistem demokrasi atau derajat keterbukaan yang berlaku.

c) Sumber dana kegiatan

Sumber dana kegiatan atau pembangunan bisa berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat. Sumber dari pemerintah bisa berasal dari tabungan pemerintah, sumbangan pihak ke tiga atau pinjaman dari luar dan dalam negeri.

d) Pemilik kegiatan

Permasalahan pemilik kegiatan tidak berbeda dengan sumber dana kegiatan dalam hal partisipasi masyarakat. Apabila pemilik kegiatan pemerintah dan diproyekkan atau dikotrakkan kepada pihak ketiga maka kegiatan tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, apabila pemilik kegiatan masyarakat maka partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, rasa

memiliki, rasa tanggung jawab, menikmati hasil, pengawasan dan evaluasi akan mudah ditumbuhkan.

e) Manfaat langsung

Manfaat langsung dari kegiatan merupakan sesuatu yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh warga seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan kesehatan.

2) Faktor Internal

a) Tingkat ekonomi

Salah salah faktor yang dapat menghambat partisipasi warga terkait dengan kondisi ekonomi. Makin sulit secara ekonomi, makin sulit dalam menggerakkan partisipasi warga, Penegasan ini logis karena warga yang secara ekonomi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan semakin terganggu hidupnya apabila waktu mereka dipergunakan untuk berpartisipasi dalam aktivitas bersama.

b) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi gambaran status sosial seseorang. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi status sosial seseorang. Orang yang memiliki status sosial tinggi akan merasa malu apabila ia tidak aktif berpartisipasi dalam aktivitas bersama.

c) Tingkat Pemahaman

Pemahaman seseorang terhadap aktivitas bersama terkait dengan manfaat program, tahu tentang peran dan tugas warga, tahu hak dan kewajiban, tujuan dan sumber dananya serta tanggung jawab warga.

d) Tingkat kepedulian

Faktor kunci penentu tingkat partisipasi warga berikutnya terkait dengan kepedulian. Orang yang memiliki kepedulian terlihat dari perhatiannya, mau tahu, mau berbuat dan berkorban untuk orang lain atau aktivitas bersama dan kepentingan publik.

e) Rasa ego

Ego berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang. Ego seseorang terlihat dari sikapnya yang keras kepala, mau benar dan menang sendiri, susah diatur dan tidak mau tahu dengan pendapat orang atau pihak lain. Makin tinggi ego seseorang, makin sulit untuk berpartisipasi dan makin besar jumlah mereka, makin sulit digerakkan untuk berpartisipasi.

f) Rasa memiliki

Rasa memiliki merupakan tingkatan yang tinggi dan tidak mudah ditumbuhkan. Penegasan ini logis karena seseorang yang telah tumbuh rasa memiliki, secara otomatis akan dibarengi tumbuhnya rasa tanggung

jawab, rasa cinta dan siap berkorban, termasuk akan berperan aktif dan positif.

- g) Jenis kelamin
Dalam berbagai aktivitas bersama, kaum laki-laki lebih banyak yang berpartisipasi dibandingkan kaum perempuan. Hal ini bermakna bahwa jenis kelamin menentukan partisipasi seseorang.
- h) Tingkat Umur
Tingkat umur bisa ditelusuri dari aspek usia anak-anak, remaja, dewasa dan tua atau anak-anak, pemuda dan dewasa (tua).

3) Bentuk (Tahap) Partisipasi

Telah disinggung sebelumnya bahwa secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam proses pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok, atau masyarakat dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya dapat menunjang keberhasilan dari sebuah proyek pembangunan.

Bentuk-bentuk partisipasi menurut Ndraha (1990:103-104) mengemukakan beberapa bentuk atau tahap partisipasi, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan (penetapan rencana).
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, dan
- 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara. Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi masyarakat adalah:

Sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan yang dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Menurut Adisasmita (2006: 34) mengemukakan bahwa :

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat besar terkait dengan pembangunan. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka program yang dilakukan akan sesuai dengan kegiatan perencanaan.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek di masyarakat. Partisipasi masyarakat mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat *top-down*, partisipasi masyarakat dalam kebijakankebijakan yang di buat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan, namun pada sistem pemerintahan yang *bottom-up*, tingginya partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

Adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan di upayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan

oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Dengan penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan tercapai secara optimal pula.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat

dukungan dalam pelaksanaannya. Menurut Slamet (Suryono 2001: 124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai: “ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan”.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Bratakusumah (2005: 16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.

Administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan (belum tentu dengan cara-cara langsung) kegiatan masyarakat luas, sesuai dengan arah kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses

pembangunan. Menurut Tjikroamidjojo (1995: 224) ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- 1) Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menemukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- 2) Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahannya mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
- 4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

B. Deskripsi Fokus Penelitian

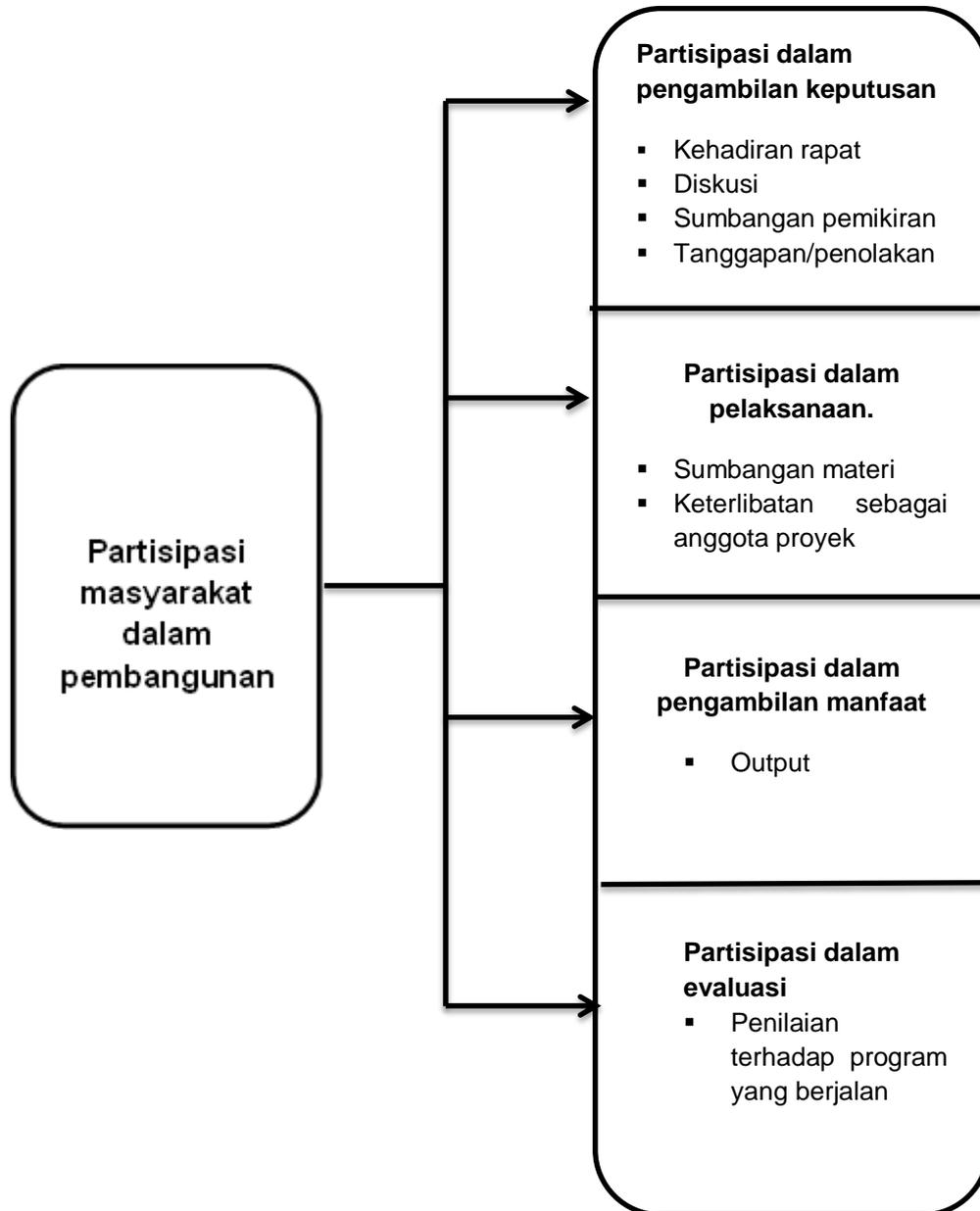
Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Adapun indikatornya terdiri atas
 - a. Kehadiran rapat
 - b. Diskusi
 - c. Tanggapan/penolakan

2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Adapun indikatornya terdiri dari tiga sub indikator yaitu :
 - a. Sumbangan pemikiran
 - b. Sumbangan materi
 - c. Keterlibatan sebagai anggota proyek
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Adapun indikatornya yaitu: Output
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Adapun indikatornya terdiri dari 1 sub indikator yaitu: Bagaimana pelaksanaan program berjalan.

C. Kerangka Konsep

Gambar 1
Kerangka Konsep



Sumber : Cohen dan Uphoff (Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011: 61-63)

D. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Desa Gareccing ditinjau dari aspek pengambilan keputusan?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Desa Gareccing ditinjau dari aspek pelaksanaan?
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Desa Gareccing ditinjau dari aspek pengambilan manfaat?
4. Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Desa Gareccing ditinjau dari aspek evaluasi?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kondisi nyata dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang obyektif. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut untuk dihasilkan sebuah penemuan atau data yang diharapkan. Data-data yang diperoleh peneliti di lapangan dikategorisasikan menurut pokok permasalahan agar peneliti lebih mudah dalam melihat relasi satu data dengan yang lainnya. Penyajian/*display* secara deskriptif membantu peneliti untuk dapat memahami pokok permasalahan secara mendalam sehingga peneliti mudah untuk melakukan penarikan kesimpulan penelitian.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian ini yaitu peneliti menentukan lokasi fokus penelitian di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, serta yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. Adapun rencana kegiatan penyusunan penelitian sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, waktu penelitian yaitu bulan April Tahun 2019.

2. Tahap Kegiatan Penelitian

Pada tahap ini dari tujuh tahap kegiatan yang akan disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya. Agar penelitian bisa berlangsung secara sistematis maka dibutuhkan jadwal penelitian yang baik. Berikut adalah jadwal pelaksanaannya yang akan dilaksanakan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 1
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Penyusunan Proposal					
	Seminar Proposal					
2	Pelaksanaan Penelitian					
	Pengumpulan dan Pengolahan Data					
3	Penulisan Skripsi					
	Ujian dan Revisi					
	Penyerahan Skripsi					

C. Unit Analisis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, sedangkan data sekunder adalah dari telaah dokumen dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia pada lokus penelitian khususnya menyangkut dokumen yang relevan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data ialah subyek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dan adapun informan yang menjadi sumber data yaitu:

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa	1 Orang
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	2 Orang
3. LPMD	1 Orang
4. Kelompok Tani	1 Orang
5. Tokoh Masyarakat	3 Orang
<hr/>	
Jumlah	8 Orang

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen.

a. Wawancara

Dalam wawancara ini dilakukan komunikasi atau interaksi berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan tersebut untuk mendapatkan data dan informasi tentang masalah yang diteliti. Dengan teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari informan untuk memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan yang mengacu pada pedoman wawancara yang disediakan. Wawancara ini dilakukan terutama terhadap informan yang berhubungan dengan masalah penelitian informan penelitian adalah orang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dalam program tersebut. Wawancara ini diharapkan penulis menemukan permasalahan secara lebih baik terbuka dan mendalam. Adapun informan yang akan diwawancarai sesuai dengan yang terdapat pada unit analisis.

b. Telaah Dokumen

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Peneliti juga melengkapinya dengan melakukan pencarian melalui internet. Dengan adanya dokumentasi juga digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Metode dokumentasi dilakukan untuk memberikan data yang akurat bahwa penelitian tersebut memang dilakukan. Teknik penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia pada lokus penelitian, khususnya menyangkut dokumen yang relevan dengan obyek penelitian. Adapun dokumentasi sebagai sumber data tambahan digunakan sebagai

pembandingan terhadap data yang diperoleh dari responden, sehingga semakin memperkaya informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles (1994: 20). Teknik analisis ini mempunyai tiga alur yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data yaitu, Data hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat banyak. Oleh karena itu, data perlu dirangkum, dikategorikan sesuai hal-hal pokok yang penting serta sesuai dengan tema yang sedang diteliti. Setelah direduksi, didapatkan data yang memberikan informasi lebih jelas dan sesuai tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Reduksi bertujuan untuk membuat data lebih fokus terhadap pemecahan masalah dan juga menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan reduksi data sejak terjun langsung di lapangan. Adapun data-data yang peneliti dapatkan di lapangan adalah data-data terkait pemahaman informan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Penyajian data yaitu, Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam teks bersifat naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari data yang telah disajikan tersebut kemudian dibahas dan ditafsirkan berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas terkait cara dan level partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, Setelah direduksi, disajikan dan dianalisis kemudian disimpulkan. Kesimpulan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan beserta kelebihan dan kekurangannya tersebut merupakan abstraksi dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan dan pembahasan yang peneliti lakukan berdasarkan teori yang telah dikemukakan.

F. Keabsahan Data

Pengabsahan data harus dilakukan untuk penelitian kualitatif. Pengabsahan data dilakukan dengan cara pengecekan ulang (*membercek*). *Membercek* adalah kembali mempertanyakan kesesuaian hasil interpretasi data wawancara, kepada satu atau dua orang informan kunci, untuk mengetahui apakah hasil interpretasi tersebut sudah sesuai dengan maksud informan kunci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi singkat Lokus/Objek Penelitian

1. Sejarah terbentuknya Desa Gareccing

Nama Gareccing merupakan salah satu Desa yang dibentuk dan disahkan menjadi Kompleks Kampung Masyarakat Adat Gareccing Bulu-Bulo Barat pada Tanggal 4 Juli 1939 sesuai dengan Keputusan Asisten Residen Bantaeng oleh Van Der Bork. Adapun Pemangku Adat Kompleks Kampung Masyarakat Adat Bulu-Bulo Barat yang berkedudukan di Gareccing adalah: Barokeng Daeng Mattaro. Arung Kompleks Kampung Masyarakat Adat Gareccing memerintah hingga tahun 1960, hal ini diakibatkan karena adanya pergantian Pemerintahan sehingga beberapa Arung seperti Arung Siri, Arung Nangka dan Arung Gareccing digabung menjadi satu desa yaitu Desa Sanggiasseri. Kemudian Desa Sanggiasseri dimekarkan menjadi dua Kelurahan yaitu Kelurahan Sanggiasseri dan Kelurahan Bikeru. Desa Gareccing adalah merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sinjai Selatan yang berdiri kembali sejak tahun 2002 yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Bikeru menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Gareccing dan Desa Alenangka. Sebelum defenitif, Desa Gareccing dirintis dan di prakarsai oleh masing-masing Panitia Sembilan bersama warga masyarakat dan pada tanggal 27 Februari 2003 Desa Gareccing di sahkan menjadi salah satu desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan.

Adapun Kepala Desa yang pernah memimpin di Desa Gareccing secara berturut-turut adalah:

Tabel 2
Kepala Desa Yang Pernah Memimpin di Desa Gareccing
Tahun 2002-2019

No	Nama	Jabatan	Periode	Ket
1	A. Abd. Asis	Plt. Kepala Desa	2002 s/d 2003	
2	M. Arsyad	Kepala Desa	2003 s/d 2010	
3	Irwan Parenrengi	Kepala Desa	2010 s/d 2015	
4	A. Abd. Asis, S.Sos	Plt. Kepala Desa	2016	
5	Irwan Parenrengi	Kepala Desa	2017 Sekarang	

Sumber: Data Profil Desa Gareccing Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan daftar Kepala Desa yang pernah memimpin di Desa Gareccing dimulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 yang bernama Bapak Irwan Parenrengi (Kepala Desa).

2. Visi dan Misi Desa Gareccing

a. Visi Desa Gareccing

Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Pembangunan yang Berkarakter, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Misi Desa Gareccing

Misi sebagai suatu komitmen yang diupayakan untuk dicapai melalui prioritas dan pokok-pokok program serta kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*good government*)
- 2) Pembangunan Desa Berkelanjutan dan berkesinambungan
- 3) Pembinaan Masyarakat Desa
- 4) Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya peran-serta masyarakat dalam semua kegiatan pembangunan dan pemerintahan melalui pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan baik, memberi jaminan keadilan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Pemerintah Desa.

3. Keadaan Geografis

Desa Gareccing merupakan desa yang terletak ± 25 Km dari ibu kota Kabupaten Sinjai dan ± 2 Km dari Kecamatan Sinjai Selatan yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian 275 - 650 m di atas permukaan air laut dengan luas wilayah $\pm 542,75$ Ha. Desa Gareccing terbagi atas 3 Dusun yaitu Dusun Tanah Tengnga, Dusun Bulujampi, Dusun Lita-Litae. Adapun batas-batas wilayah Desa Gareccing sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Talle
- b. Sebelah Timur : Desa Alenangka
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Sanggiasseri
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Sanggiasseri

4. Keadaan Demografis

Masalah kependudukan merupakan salah satu unsur penting bagi pembangunan karena penduduk sebagai subjek dan sekaligus objek (sasaran) pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar

merupakan *asset* pembangunan dilain pihak jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas yang memadai akan menjadi beban pembangunan untuk mengatasi masalah tersebut ditempuh berbagai kebijaksanaan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Penduduk Desa Garecing menurut data monografi per Februari tahun 2019 tercatat sebanyak 2.410 jiwa yang terdiri dari: Laki-laki 1.216 jiwa dan Perempuan 1.194 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 568.

Adapun rincian jumlah penduduk Desa Garecing dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3
Keadaan Penduduk Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			L	P	L+P
1	Tanah Tengnga	168	408	406	814
2	Bulujampi	186	374	373	747
3	Lita-Litae	218	439	411	850
JUMLAH		572	1.221	1.190	2.411

Sumber: Data Profil Desa Garecing Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan keadaan penduduk berdasarkan jumlah penduduk yang mana jumlah Kartu Keluarga (KK) Dusun Tanah Tengnga sebanyak 168 jiwa, Dusun Bulujampi sebanyak 186 jiwa, dan Dusun Lita-Litae sebanyak 218 jiwa dengan total keseluruhan yakni 572 jiwa, rincian lengkap mengenai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel diatas.

Mata pencaharian Desa Gareccing cukup beragam dan bervariasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 4
Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	43	1,78 %
2	Pedagang	23	0,95 %
3	Petani	508	21,08 %
4	Buruh Swasta	23	0,95 %
5	Tukang Batu	28	1,16 %
6	Tukang Kayu	17	0,71 %
7	Peternak	13	0,54 %
8	Perbengkelan	2	0,08 %
9	Sopir	9	0,37 %
10	Penjahit	5	0,21 %
11	TNI / POLRI	2	0,08 %

Sumber: Data Profil Desa Gareccing Tahun 2019

Petani sebagai kelompok mata pencaharian masyarakat dalam tabel 4 diatas karena hampir semua masyarakat melakukan pekerjaan tersebut. Sebagai mana kita ketahui wilayah Desa Gareccing merupakan daerah agraris jadi mata pencaharian dari masyarakat berasal dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.

Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat diharapkan pada masyarakat sekarang sangat berkaitan dengan tingkat penduduk yang merupakan indikator yang paling riil untuk

mendukung kualitas masyarakat secara signifikan akan meningkat pula kemampuan teknis dan manajerial dalam aktifitas sehari-hari.

Dalam kontes pembangunan peningkatan jumlah penduduk mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa baik secara individu maupun secara kelembagaan tentunya hal ini berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang telah ditempuh. berikut gambaran keadaan penduduk Desa Gareccing berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 5
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak Tamat SD	409	16,97 %
2.	Tamat SD	684	28,38 %
3.	Tamat SLTP	620	25,73 %
4.	Tamat SLTA	562	23,32 %
5.	Tamat Perguruan Tinggi	135	5,60 %

Sumber: Data Profil Desa Gareccing Tahun 2019

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat sudah cukup memadai, ini berarti bahwa kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan cukup tinggi, namun demikian masih perlu ditingkatkan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan potensial didalam memainkan perannya dalam meningkatkan pembangunan.

5. Struktur Organisasi Desa Gareccing

Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarnya, karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Tepatnya struktur harus mengikuti strategi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka susunan struktur organisasi pemerintahan Desa Gareccing adalah sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Gareccing



a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Memimpin menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- 4) Menetapkan Peraturan Desa
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan Kehidupan sosial masyarakat desa
- 12) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
- 13) Memanfaatkan teknologi masyarakat desa
- 14) Menkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 15) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan
- 16) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

17) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintah Desa
- 2) Mengoordinasikan pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan
- 3) Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4) Menyelenggarakan kesekretariatan desa
- 5) Menyelenggarakan administrasi desa
- 6) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan administrasi pemerintah desa
- 7) Melakukan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa, dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Pelaksana Teknis Lapangan

- 1) Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan, ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b) Melaksanakan administrasi kependudukan
- c) Melaksanakan administrasi pertanahan
- d) Melaksanakan pembinaan sosial politik
- e) Memfasilitasi kerjasama pemerintah desa
- f) Menyelesaikan perselisihan warga
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2) Kasi Kesejahteraan

Kasi Kesejahteraan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang kesejahteraan, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa
- b) Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa
- c) Mengoorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dibidang tugasnya
- d) Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup,dan
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3) Kasi Pelayanan

Kasi Pelayanan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa dibidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan perlindungan anak
- b) Mengoorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya, dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

4) Pelaksana Urusan Administrasi Pemerintah Desa meliputi:

- a) Kaur TU dan Umum

Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat desa yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan. Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan urusan surat menyurat
- (2) Melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa
- (3) Melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa
- (4) Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa
- (5) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa
- (6) Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum yang diberikan oleh Kepala Desa

(7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Kaur Keuangan

Urusan keuangan merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dibidang keuangan. Urusan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDesa
- (2) Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa
- (3) Mengelola administrasi keuangan desa
- (4) Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa, dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c) Kaur Perencanaan

Urusan perencanaan merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Urusan perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintahan Desa
- (2) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja Pemerintahan Desa secara rutin dan atau berskala

- (3) Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
- (4) Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa
- (5) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- (6) Menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa
- (7) Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan perencanaan yang diberikan oleh Kepala Desa
- (8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)

Pelaksana kewilayahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun
- (2) Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta membina ketentraman dan ketertiban wilayah dusun
- (3) Mensosialisasikan dan melaksanakan peraturan desa, peraturan dan keputusan Kepala Desa kepada masyarakat desa
- (4) Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat desa
- (5) Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan wilayah dusun
- (6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya, dan
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

B. Karakteristik Sumber Data

1. Kepala Desa

Sumber data dalam penelitian ini adalah Bapak Irwan Parenrengi selaku Kepala Desa di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai. Beliau lahir di Sinjai tanggal 5 Desember 1965. Pendidikan tamatan SMA. Beralamat di Dusun Tanah Tengnga Sesa Gareccing. Beliau sudah dua kali terpilih dalam pemilihan Kepala Desa yaitu tahun 2010-2015, dan 2017 sampai sekarang.

2. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Bapak Rajja S.A, Ma.Pd. lahir di Bikeru Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai tanggal 14 Juni 1958. Menempuh pendidikan di IKIP Makassar. Beralamat di Cappa Bulu Desa Gareccing. Selain Ketua BPD, juga diperoleh sumber data dari salah satu anggota BPD yaitu Firman Fasis yang lahir di Bikeru Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai tanggal 23 Oktober 1976. Beliau menempuh pendidikan sampai tingkat SMA.

3. Ketua LPMD

Sumber data dalam penelitian ini adalah Bapak H. Asis Buke Sattung, ST. Beralamat di Lita-Litae Desa Gareccing. Lahir di Bikeru Sinjai Selatan tanggal 31 Desember 1956. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Makasaar.

4. Perwakilan Kelompok Tani

Sumber data dalam penelitian ini adalah salah satu perwakilan dari kelompok tani yang ada di Desa Gareccing, yaitu Bapak Muhammad Harifuddin. Beliau lahir di Manimpohoi tanggal 19 Mei 1975. Menempuh pendidikan sampai tingkat SMA.

5. Tokoh Masyarakat

Salah satu sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat sebanyak tiga orang. Yaitu Lukman, Jufri dan Husain. Ketiganya menempuh pendidikan hanya sampai tingkat SMA. Lukman lahir di Bikeru tanggal 12 Oktober 1980, Jufri lahir di Cappa Bulu tanggal 15 Maret 1970, dan Husain lahir di Honto tanggal 14 November 1967.

C. Paparan dan Reduksi Data

Paparan dan reduksi data pada penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yang kemudian direduksi sesuai pedoman yang telah disiapkan oleh penulis berdasarkan kerangka konsep yang telah dipaparkan sebelumnya tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Maka pertanyaan penelitian ini dilihat dari beberapa aspek yaitu: Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi.

D. Hasil Analisis Data

Hasil dari penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan. Adapun sub fokus yang diambil dari kerangka konsep yang terdiri dari empat indikator yang diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

a. Kehadiran Rapat

Rapat merupakan bentuk komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting, diselenggarakan oleh banyak organisasi, agar permasalahan dapat dipecahkan dan berbagai kebijaksanaan organisasi dapat dirumuskan.

Kegiatan seperti ini merupakan wujud komunikasi sosial dalam rangka melaksanakan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta forum dapat menyampaikan aspirasinya, dengan melihat antusiasme masyarakat dalam menghadiri rapat yang dilaksanakan juga diharapkan agar partisipasi masyarakat terus meningkat.

Hal ini didukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Gareccing yaitu Bapak Irwan Parenrengi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat khususnya dalam Musrenbang pada wawancara tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, yaitu sebagai berikut:

Dalam proses Musrenbang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat sangat baik. Saya sebagai Kepala Desa yang berperan penting dalam mengawasi perangkat-perangkat yang ada di desa ini selalu menghimbau agar masyarakat jangan hanya menikmati hasil tetapi juga turun langsung melihat bagaimana setiap tahapan itu dilakukan. Misalnya dalam menghadiri rapat agar kiranya turut berpartisipasi jika memiliki kesempatan dan tidak ada pekerjaan lain pada saat itu. Masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut lumayan banyak sekitar 80 % dari banyaknya undangan yang dibagikan. Hal ini berarti tingkat partisipasi masyarakat sangat baik khususnya dalam menghadiri Musrenbang.

Dari hasil wawancara diatas bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Desa Gareccing khususnya dalam menghadiri rapat cukup baik. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Rajja, S.A., Ma.Pd, selaku dari Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pada wawancara tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing yang mengatakan:

Pemerintah Desa Gareccing melakukan musyawarah desa bersama BPD dengan mengundang tokoh masyarakat (unsur-unsur masyarakat Desa Gareccing) untuk membahas segala rencana yang terkait dengan pembangunan desa. Saya melihat masyarakat sangat antusias dalam menghadiri rapat yang dilaksanakan. Hampir seluruh undangan hadir.

Dari wawancara diatas menyebutkan bahwa dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan di kantor Desa Gareccing dengan Bapak H. Asis Buke Sattung, ST selaku Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang mengatakan:

Saya selalu memberikan arahan kepada masyarakat di Desa Gareccing baik itu ketika saya bertemu dalam kegiatan atau diluar, agar mereka memiliki kemauan yang besar untuk selalu hadir dalam rapat yang dilaksanakan, dan upaya tersebut bisa mereka terima dan sekarang pun saya melihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Hampir seluruh undangan ikut berpartisipasi.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Gareccing sangat berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai sangat baik, karena di Desa Gareccing masih kental rasa kegotong royongan, sehingga masyarakat selalu ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan yang akan di lakukan Pemerintah Desa.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu Kelompok Tani Bapak Muhammad Harifuddin pada tanggal 8 April 2019, ketika ditanyakan mengenai pertanyaan yang hampir sama mengenai dari sekian banyak undangan yang tersebar untuk menghadiri rapat Musrenbang apakah ada yang berhalangan hadir, dan beliau mengatakan:

Dari sekian banyak undangan yang tersebar untuk menghadiri rapat tentunya ada beberapa yang berhalangan hadir seperti petani, jika ada 50 undangan yang kita sebar maka yang hadir sekitar 30 orang lebih, bisa dikatakan kehadiran cukup bagus selama ini.

Dari hasil wawancara dapat dilihat dari unsur warga yang dilampiri daftar peserta/hadir Musrenbang, peran partisipasi masyarakat dalam Musrenbang berjalan optimal dan aktif dikarenakan warga memiliki waktu luang, mempunyai informasi, dan pengetahuannya hingga akhirnya undangan yang tersebar dapat berkesempatan menghadiri setiap ada rapat Musrenbang.

Setelah melakukan wawancara dengan informan diatas, kemudian peneliti melakukan telaah dokumen Daftar Hadir dan mengambil gambar yang diperlihatkan langsung, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3
Daftar Hadir Musrenbang Tahun 2018

Nama Kegiatan		DAFTAR HADIR		
Waktu		: Rapat Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2018		
Tempat		: Rumah Waris Desa Buljamp. Desa Gareccing		
No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Tanda Tangan
1	KARZA	K. T. I		
2	HERSOLIM	TA. POND	Sungai	
3	JALWAN	K. POND	Gareccing	
4	NICH. MULLI	THI (Belanda)	Sungai	
5	ANDI MAPPALAYAH	PDTI Sungai	Sungai	
6	AEMAN	PTD Gareccing	Tulle	
7	JABAR	Kadus	Buljamp	
8	Uluar	Kl. Ng. I	Uta. Uta	
9	Muti Ma	K. T. I	Buljamp	
10	CADRE	K. T. II	Buljamp	
11	Uppang	K. T. II	Buljamp	
12	ABD. RAHMAN	Kadus	T. Temaga	
13	Wahid Koko	T. Temaga	Uta. Uta	
14	MITRAN	Kl. RT. II	Uta. Uta	
15	H. MUSTAPA	K. Gareccing	Uta. Uta	
16	H. ABDUL SALAM	E. Yayasari	Buljamp	
17	MARJEGALIT	Kadus	Gareccing	
18	ST. HUR. HAYATI	Perwakilan	Gareccing	
19	Arni Ali P	Perwakilan	Gareccing	
20	MUCHLISAR	Angg. BPD	T. Temaga	
21	Mari N.R.	Temaga	E. Uta. Uta	
22	Isuandi S.pd	Kadus	Uta. Uta	
23	Bahar	BPD	Farah Temaga	
24	IRMAN. FASIS	Ang. BPD	Uta. Uta	
25	Al. ILYAS	BPD	Buljamp	
26	AABHAMUDIN	BPD	B. Jampi	
27	Kanuniah S.Pd	Kor. Kemaga	T. Temaga	
28	SUBATI, A. Mo	Kor. Kelayutan	B. Jampi	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

Gambar diatas adalah Daftar Hadir kegiatan rapat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) tahun 2018 pada Rabu 12 Desember 2018 bertempat di Rumah Waris Desa Gareccing dan sebanyak 28 orang yang menghadiri rapat tersebut.

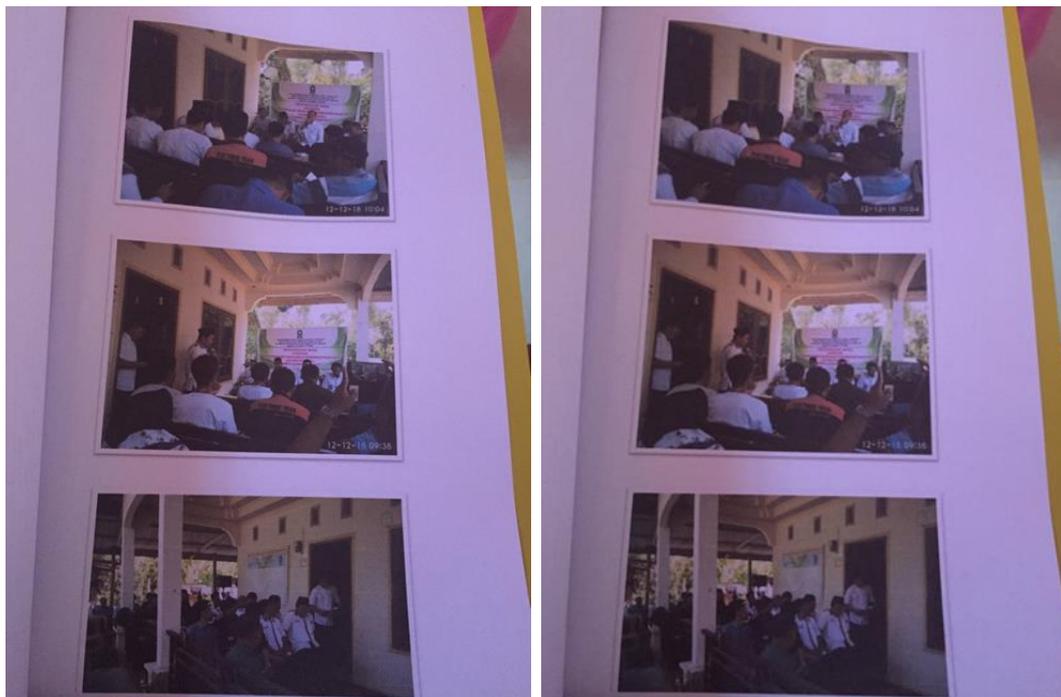
Kemudian peneliti melakukan konfirmasi kembali kepada Kelompok Tani, Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam menghadiri setiap rapat yang di adakan. Bapak Muhammad Harifuddin salah satu Kelompok Tani, saat kami wawancarai di kantor Desa Gareccing tanggal 8 April 2019, menambahkan bahwa: “Kalau ada rapat tergantung di pemerintahannya dan cara pemerintahannya”.

Peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan

dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Desa Gareccing sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan desa.

Setelah melakukan wawancara dengan informan diatas, kemudian peneliti melakukan telaah dokumen mengenai dokumentasi yang diambil saat kehadiran rapat, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4
Kehadiran Rapat



Gambar 4 diatas adalah kehadiran rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, terlihat warga sangat antusias dalam menghadiri rapat yang diselenggarakan.

b. Diskusi

Diskusi disini adalah terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih, khususnya dalam bentuk Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Dalam diskusi ini biasanya ada tema atau topik yang dibahas oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya, biasanya hasil dari topik yang dibahas tersebut yaitu adanya pemahaman mengenai topik yang telah dibicarakan bersama. Diskusi juga bisa dianggap sebagai cara untuk bertukar pikiran demi meraih adanya kesepakatan untuk bersama.

Hal ini di dukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Irwan Parenrengi selaku Kepala Desa Gareccing pada tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, ketika ditanyakan bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap diskusi dan apa yang biasa di diskusikan, beliau mengatakan bahwa:

Kebetulan peserta yang ikut dalam rapat rata-rata memiliki keaktifan dalam berbicara apalagi berdiskusi dengan yang lainnya. Mereka juga tidak canggung satu sama lain karena mereka sudah saling mengenal, jadi paling saya hanya menghimbau saja agar kiranya masyarakat terus aktif dalam forum.

Dalam pelaksanaan musyawarah desa ini pemerintah setempat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan. Pada saat kegiatan ini berlangsung masyarakat bisa dengan leluasa memberikan masukan dan tanggapan demi kemajuan desanya.

Kepala Desa Bapak Irwan Parenrengi pada saat wawancara tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, menambahkan:

Yang biasanya masyarakat sampaikan dalam diskusi rapat yakni usulan-usulan mengenai bagaimana perbaikan-perbaikan irigasi dikelompok, dan bantuan-bantuan peternakan itu yang sering saya usulkan kepada masyarakat dan tanggapan mereka cukup baik akan hal tersebut.

Partisipasi atau peran masyarakat Desa Gareccing pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, tumbuh berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan.

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak H. Asis Buke Sattun, ST selaku Ketua LPMD (Lembaga Pmberdayaan Masyarakat Desa) pada tanggal 8 April 2019 di kantor Desa Gareccing, ketika ditanyakan mengenai bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap diskusi dan apa yang biasa di diskusikan, beliau mengatakan:

Iya hampir semua peserta aktif dalam rapat tersebut, rata-rata mereka memiliki pendapat yang dituangkan dalam forum tersebut. Sejauh ini kendala yang ada hanya karena keterlambatan informasi bagi masyarakat dikarenakan peserta tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan, jadi pasti ada masyarakat yang terlambat menyerap informasi yang disampaikan, tetapi itu tidak menjadi kendala yang besar karena kita mencoba memberikan pemahaman secara perlahan agar mereka mengerti.

Dari hasil wawancara diatas yakni jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat.

Bapak Muhammad Harifuddin salah satu Perwakilan Kelompok Tani Desa Gareccing pada wawancara di kantor Desa Gareccing tanggal 8 April 2019, ketika ditanyakan mengenai bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap diskusi dan apa yang biasa di diskusikan, yakni:

Masyarakat dalam partisipasinya dalam setiap diskusi sangat aktif, tentu sangat baik yang mana pembangunan yang diharapkan bisa tepat terlaksana dan tentunya manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat dilibatkan secara langsung sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.

Pernyataan lain juga dikemukakan oleh Bapak Rajja S.A., Ma.Pd selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pada wawancara tanggal 5 April 2019 beliau mengatakan:

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksanaannya harus melibatkan semua masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dalam pembangunan.

Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan tersebut. Pemerintah perlu membina masyarakat dalam merencanakan apa yang dibutuhkan, melaksanakan

program yang telah direncanakan, dan menjaga atau melestarikan program yang telah dilaksanakan. Pelaku utama dalam pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

Kemudian peneliti melakukan konfirmasi kepada salah satu tokoh masyarakat Desa Gareccing yang bernama Bapak Jufri saat kami wawancarai di kantor Desa Gareccing pada tanggal 9 April 2019, mengenai bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap diskusi dan apa yang biasa di diskusikan, yakni:

Hampir semua ikut bicara dan saya rasa memang harus karena semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, masyarakat lah yang berperan dan mempunyai hak dalam memberikan ide, dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Desa Gareccing dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan.

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak H. Asis Buke Sattun, ST selaku Ketua LPMD (Lembaga Pmberdayaan Masyarakat Desa) pada tanggal 8 April 2019 dengan pertanyaan yang serupa dan beliau mengatakan:

Musyawah ini untuk peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program pembangunan yang telah

disusun.

Musyawarah dilakukan dalam rangka peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program pembangunan yang telah disusun.

Pernyataan diatas kemudian dicocokkan dengan telaah dokumen mengenai diskusi yang sedang berjalan, peneliti menemukan bahwa semua yang ada dalam diskusi turut andil dalam setiap kegiatan. Berikut tampilan yang di ambil atau difoto:

Gambar 5
Diskusi



Ini adalah tampilan diskusi dalam musyawarah desa tentang Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang). Musyawarah dilakukan dalam rangka peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan

peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program pembangunan yang telah disusun.

C. Sumbangan Pemikiran

Partisipasi masyarakat selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Partisipasi juga dapat dikatakan sebagai keterlibatan sumbangan pemikiran di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Uraian tersebut di atas berdasarkan unsur penting dalam partisipasi yaitu partisipasi merupakan suatu keterlibatan pikiran, ketersediaan memberi sesuatu sumbangan dalam usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu dan ikut dalam tanggung jawab saat menjadi bagian dari kelompok. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Bapak Irwan Parenrengi, pada wawancara tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, ketika ditanyakan mengenai bentuk sumbangan pemikiran yang diberikan oleh masyarakat, beliau mengatakan bahwa: "Masyarakat yang datang semuanya aktif dalam forum pada saat itu dan sangat berpartisipasi".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik saja tapi juga pemikiran yang menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Rajja, S.A., Ma.Pd pada wawancara tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, saat ditanya mengenai pertanyaan yang sama yakni apa saja bentuk

sumbangan pemikiran dari masyarakat, beliau mengatakan bahwa: “Sumbangan pemikiran dari masyarakat mengenai langkah pembangunan oleh pemerintah, tentunya sekitar diskusi pembangunan dan banyak lagi yang lain”.

Dari hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa sumbangan pemikiran dari masyarakat tentang langkah pembangunan oleh pemerintah.

Bapak Rajja, S.A., Ma.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada wawancara di kantor Desa Garecing pada tanggal 5 April 2019 menambahkan bahwa: “Masyarakat aktif juga dalam memberikan masukan-masukan pada saat diskusi berjalan, jangankan masukan bahkan kritikan juga masuk”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan Desa Garecing yaitu berupa kehadiran dalam pertemuan, memberikan informasi tentang keadaan dan potensi desa, selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bahkan kritikan yang tentunya sangat membangun.

Sejalan dengan pendapat diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak H. Asis Buke Sattun, ST selaku Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) pada tanggal 8 April 2019 beliau mengatakan:

Keterlibatan masyarakat dalam diskusi pembangunan sangat aktif dan masyarakat yang menghadiri rapat memberikan

kontribusi pemikiran untuk berjalannya pelaksanaan program pembangunan di Desa Garecing ini.

Partisipasi seseorang atau kelompok masyarakat Desa Garecing sangat berperan dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran. Hal penting yang perlu di perhatikan adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah di kategorikan ke dalam pengertian partisipasi. Oleh sebab itu dalam partisipasi non fisik masyarakat sangat mendasar sekali, terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, karena keikutsertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan wawancara pada tanggal 8 April 2019 dengan Bapak Muhammad Harifuddin salah satu Perwakilan Kelompok Tani Desa Garecing di kantor Desa Garecing yakni mengemukakan bahwa:

Pembangunan yang ada di Desa Garecing sebagian besar adalah hasil Musrenbang yang telah di laksanakan bersama masyarakat. Secara tidak langsung ide dan gagasan pembangunan awalnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat Desa Garecing, jadi mereka 'masyarakat' memang sudah berpartisipasi.

Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu

keterlibatan masyarakat sangatlah di butuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan.

Salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Husain saat wawancara pada tanggal 9 April 2019, menegaskan bahwa:

Partisipasi kita (masyarakat) dalam bentuk keterlibatan kita semua dalam memberikan buah pikiran dalam proses pembangunan. Partisipasi dapat di wujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan atau rapat dan tanggapan terhadap proses pembangunan seperti yang telah dilakukan.

Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikirannya dapat di salurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Desa Gareccing dalam pembangunan dengan bentuk ide atau pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan.

d. Tanggapan atau Penolakan

Peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gareccing dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya adalah pelaksanaan musyawarah, pramusrenbang, dan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang rutin diselenggarakan satu tahun sekali. Dalam pelaksanaan musyawarah ini pemerintah setempat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses

perencanaan pembangunan. Pada saat kegiatan ini berlangsung masyarakat bisa dengan leluasa memberikan masukan dan tanggapan demi kemajuan desanya.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Irwan Parenrengi, pada tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, ketika ditanyakan mengenai bagaimana tanggapan pelaksana program jika ada masyarakat yang memberikan tanggapan atau penolakan, dan apakah didengar dan dipertimbangkan atau tidak dianggap, beliau mengatakan bahwa:

Mengenai masukan atau kirtik yang diberikan saat ada pembangunan yang dilakukan seperti misalnya ada masyarakat yang mengkritik bahwa tidak sependapat atau kurang sesuai dengan yang mereka harapkan, tentunya di Desa Gareccing tidak ada yang seperti itu karena semuanya sesuai seperti perencanaan awal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan di Desa Gareccing semuanya sesuai dengan perencanaan awal pembangunan.

Bapak Muhammad Harifuddin salah satu Perwakilan Kelompok Tani Desa Gareccing di kantor Desa Gareccing pada saat wawancara tanggal 8 April 2019, ketika ditanyakan mengenai pertanyaan yang sama, beliau menjelaskan:

Misalnya saja ada yang mengajukan tanggapan dan penolakan didengar atau dibiarkan saja, kan artinya begini kita di masyarakat desa itu kurang dalam pemahaman regulasi, aturan yang berlaku karena regulasi didesa itu banyak sekali seperti permendagri, keuangan, undang-undang, peraturan pemerintah, nah itu yang misalnya ada menolak jadi tidak paham regulasi tapi kita menjelaskan bahwa regulasinya memang seperti ini jadi kita tidak bisa asal mengerjakan saja, penjelasan seperti inilah yang membuat masyarakat bisa

mengerti dan paham. Jadi bisa dikatakan yang menolak itu yang tidak paham regulasi.

Dari hasil wawancara bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Gareccing sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan karena perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.

Bapak Muhammad Harifuddin salah satu Perwakilan Kelompok Tani Desa Gareccing pada saat wawancara tanggal 8 April 2019 di kantor Desa Gareccing, ketika ditanyakan mengenai andai pembangunan telah berjalan atau sudah dilakukan adakah penilaian atau tanggapan masyarakat bahwa mereka tidak puas dengan hasil pembangunan, beliau mengatakan: “Artinya RAB yang disusun kita kerjakan sesuai RAB jadi tidak ada *complain* dari masyarakat karena semuanya sesuai”. Hasil pramusrenbang tersebut menjadi keputusan yang sudah tidak dapat dirubah lagi karena sudah ditentukan berdasarkan usulan masyarakat dan telah disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia.

Bapak Muhammad Harifuddin salah satu Perwakilan Kelompok Tani Desa Gareccing pada saat wawancara tanggal 8 April 2019, ketika ditanyakan mengenai dana milyaran rupiah yang diberikan ke kepala desa tapi jika dana tersebut masih ada atau bisa dikatakan tidak sepenuhnya terpakai untuk pembangunan apakah dana tersebut dikembalikan atau seperti apa, beliau menjelaskan: “Tentunya tidak karena dana tersebut nantinya masuk ke yang namanya pembiayaan SILPA dan akan digunakan ditahun berikutnya”.

Gambar diatas adalah APBD Desa Gareccing tahun 2018, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan adapun pendapatan desa dan belanja Desa Gareccing sebesar Rp. 1.776.803.770.18 pada tahun 2018.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program termasuk penilaian kebutuhan dan perencanaan program yang telah selesai dikerjakan.

a. Sumbangan Materi

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam menyelenggarakan pembangunan. Upaya di lakukan termasuk di dalamnya kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat Desa Gareccing dalam bentuk sumbangan materi adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan untuk pembangunan.

Seperti yang disampaikan Kepala Desa Bapak Irwan Parenrengi, pada tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, ketika ditanyakan mengenai bentuk sumbangan materi yang diberikan oleh masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan, beliau mengatakan bahwa: "Tidak, biasanya tenaga saja yang diberikan langsung dari masyarakat sekitar".

Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga.

Sejalan dengan pendapat diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Firman Fasis selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa di kantor Desa Gareccing pada wawancara tanggal 5 April 2019, yang mengatakan bahwa: "Partisipasi yang terbesar adalah partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran dan dilanjutkan oleh partisipasi dalam bentuk tenaga". Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa antara lain adalah partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran, dan partisipasi dalam bentuk tenaga.

Kepala Desa Bapak Irwan Parenrengi, pada wawancara tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, beliau menambahkan: "Jika ada pembangunan yang dilakukan terkadang saya turut terlibat langsung kadang juga tidak, salah satu pembangunan yang hadir dan terlibat langsung ialah pembangunan jalan tani". Dari hasil wawancara bahwa kepala Desa turut andil dalam pembangunan salah satunya pembangunan jalan tani.

Kemudian peneliti melakukan konfirmasi kepada masyarakat Desa Gareccing, apakah bentuk sumbangan tenaga saja yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Gareccing. Bapak

Lukman salah satu masyarakat saat kami wawancarai pada tanggal 9 April 2019 di kantor Desa Gareccing, menegaskan bahwa: “Dalam diskusi pembangunan juga kami biasanya menyampaikan bahwa masyarakat ingin berpartisipasi untuk pembangunan dan dapat membantu dalam bentuk tenaga”. Dari hasil wawancara tersebut bahwa salah satu masyarakat Desa Gareccing membenarkan partisipasi dalam bentuk tenaga.

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak H. Asis Buke Sattun, ST selaku Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) di kantor Desa Gareccing pada tanggal 8 April 2019, saat ditanya mengenai pertanyaan yakni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan apakah terlibat secara langsung, beliau mengatakan bahwa: “Iya tentu masyarakat disini terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan”.

Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.

Bapak Muhammad Harifuddin salah satu Perwakilan Kelompok Tani Desa Gareccing saat wawancara pada tanggal 8 April 2019, menambahkan masyarakat dalam hal ini bisa dikatakan gotong royong:

Dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Gareccing dari bentuk fisik partisipasi masyarakat sudah menunjukkan keaktifan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dilihat dari bentuk partisipasi tenaganya dari kegiatan gotong royong untuk

pembangunan, ini tidak luput dari peranan RT, RW dan Kepala Dusun.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk tenaga di Desa Gareccing dilakukan dengan wujud nyata berupa partisipasi dalam bentuk tenaga secara gotong-royong, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Desa Gareccing yang sifatnya seperti gotong royong masyarakat sudah ikut mendukung melaksanakannya.

Alasan responden memberikan jawaban faktor kesadaran pribadi yang merupakan pendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Lukman saat wawancara pada tanggal 9 April 2019 di kantor Desa Gareccing, mengenai bagaimanakah bentuk sumbangan materi yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan beliau menggambarkan bahwa:

Alasan kami ikut berpartisipasi karena kami masih punya rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat untuk saling membantu. Kami juga memang terbiasa akan kerja gotong royong, tapi terkadang terkendala karena ada yang kerja.

Indikasi ini memperlihatkan bahwa betapa besar kesadaran masyarakat Desa Gareccing untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Bapak Muhammad Harifuddin salah satu Perwakilan Kelompok Tani Desa Gareccing di kantor Desa Gareccing saat wawancara pada

tanggal 8 April 2019, menambahkan mengenai sumbangan materi yang diberikan oleh masyarakat, beliau mengatakan:

Mengenai sumbangan materi yang diberikan kepada masyarakat tentu ada dan banyak, kalau sumbangan materi contohnya pembebasan lahan, misalnya tanah kita ambil satu meter kedalam untuk pembuatan saluran dan itu kita ganti dengan uang.

Dari hasil wawancara diatas bahwa untuk pembebasan lahan masyarakat untuk pembuatan lahan maka digantikan berupah uang kepada masyarakat

b. Keterlibatan Sebagai Anggota Proyek

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah keterlibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

Bapak Firman Fasis selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa pada wawancara tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, mengenai sejauh apa keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, beliau mengatakan:

Aktif semua dan jika diakan Musrenbang maka semua perwakilan baik dari Anggota DPRD, Dinas Kesehatan, Sekolah, Pertanian, dan tentunya Camat menyempatkan waktu dalam menghadiri pertemuan. Semua pemerintahan yang ada disesa ini hadir pada saat Musrenbang berlangsung.

Keikutsertaan masyarakat dan undangan yang datang secara sukarela untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan, peluang dan kesempatan yang di

berikan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan sangat besar.

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak H. Asis Buke Sattun, ST selaku Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) pada tanggal 8 April 2019 terkait pertanyaan yang sama bagaimana keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek yang akan dilaksanakan, beliau menjelaskan:

Pembangunan fisik di Desa Gareccing sudah mulai berjalan setelah pemerintah memberikan bantuan dana untuk desa. Sarana prasarana yang dibangun berguna untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat Desa Gareccing dirasa cukup baik dan juga tingkat partisipasi dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan terwujud dengan baik.

Dari hasil wawancara bahwa dana desa yang diberikan untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gareccing dan keterlibatan masyarakat cukup baik untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan menurut Kepala Desa Bapak Irwan Parenrengi pada saat wawancara tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, mengatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian proses dari pembangunan desa. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang ada. Masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut karena mereka merasa bertanggungjawab atas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Ini adalah jenis partisipasi yang mana masyarakat menjadi salah satu unsur dalam penentu keberhasilan program itu sendiri dan juga pemerintah desa sangat penting untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat peduli terhadap pembangunan yang ada dan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Bapak Muhammad Harifuddin salah satu Perwakilan Kelompok Tani Desa Gareccing pada wawancara tanggal 8 April 2019 di kantor Desa Gareccing, ketika ditanyakan mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek yang akan dilaksanakan, beliau menjelaskan:

Partisipasi masyarakat yang meliputi pelaksanaan sangat diperlukan dalam mendorong percepatan pembangunan, pembangunan tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Desa yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di pedesaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Gareccing dalam pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, baik berupa bantuan berupa tenaga maupun pemikiran. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, diantaranya adanya sosialisasi, kesempatan, dan faktor pemimpin. Namun dikatakan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Rajja, S.A., Ma.Pd pada wawancara tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing bahwa:

Jika ditanyakan tentang bagaimana masyarakat tanggap terhadap pembangunan yang ada saya katakan bahwa partisipasinya memang tidak terlalu besar namun tidak boleh juga dikatakan kecil. Saya melihat warga masyarakat saya

memiliki partisipasi yang baik, mereka masih mau membantu pemerintah untuk membangun daerahnya.

Dari hasil wawancara diatas bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju kearah yang lebih baik.

3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi didalam pemanfaatan, partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.

a. Output

Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga untuk megoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Partisipasi ini terkait dengan kualitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai, dari segi kualitas dapat dilihat dari *output*.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Irwan Parenrengi pada tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, ketika ditanyakan mengenai bagaimana *output* atau keluaran yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

Sangat bermanfaat apalagi setiap kegiatan pembangunan desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu manfaat dari pembangunan desa merupakan penentu atau akhir dari proses keikutsertaan masyarakat guna mencapai keberhasilan pembangunan desa.

Partisipasi dalam pelibatan masyarakat pada tahap pemanfaatan optimal suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Gareccing.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Irwan Parenrengi, pada tanggal 5 April 2019 di kantor Desa Gareccing, ketika ditanyakan mengenai manfaat yang dirasakan dari dilakukannya pembangunan tersebut, beliau menambahkan: "Manfaat yang dirasakan banyak sekali, apalagi masyarakat sekarang tidak terlalu repot dalam mengangkut sawahnya dari sawah ke jalan raya atau ke pinggir sawah". Dari hasil wawancara bahwa banyak manfaat yang langsung dirasakan saat dilakukannya pembangunan di Desa Gareccing salah satunya sarana yang dapat memudahkan petani saat mengangkut hasil sawahnya dari sawah ke jalan raya atau pinggir sawah mereka.

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan terkait pertanyaan yang sama kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Rajja, S.A., Ma.Pd pada wawancara di kantor Desa Gareccing tanggal 5 April 2019, beliau menjawab sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat Desa Gareccing terhadap pembangunan desa memiliki nilai-nilai gotong royong, bahu-membahu dan rela berkorban untuk pembangunan demi tercapainya tatanan masyarakat.

Dari wawancara diatas bahwa masyarakat sadar akan diri dan tanggung jawabnya sebagai mahluk sosial yang hidup untuk saling membantu dan mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.

Bapak Firman Fasis selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa pada wawancara di kantor Desa Gareccing tanggal 5 April 2019, beliau menambahkan bahwa:

Masyarakat harus lebih memahami dan menyadari bahwa apa yang mereka pikirkan dan lakukan harus sesuai dengan cara hidup bermasyarakat, sebagai masyarakat yang tinggal atau berdomisili di Desa Gareccing harus menyadari bahwa yang berkaitan dengan kepentingan bersama harus di dukung karena setiap kebijakan dalam pembangunan di desa adalah untuk kepentingan semua masyarakat di desa dan yang akan menerima manfaat dari pembangunan yang ada di desa adalah semua masyarakat mulai dari anak kecil sampai orang dewasa.

Secara garis besar hasil wawancara diatas, bahwa manfaat dari pembangunan adalah untuk semua masyarakat tanpa memandang status, jabatan, golongan, umur dan lain sebagainya karena pada hakekatnya manfaat dari pembangunan desa adalah untuk kepentingan bersama.

Selain itu Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Bapak H. Asis Buke Sattun, ST pada saat wawancara dengan beliau tanggal 8 April 2019 di kantor Desa Gareccing, mengenai bagaimana *output* atau keluaran yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa: "Manfaat pembangunan yang dihasilkan di Desa Gareccing, dalam setiap anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada".

Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati.

Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Bapak H. Asis Buke Sattun, ST pada saat wawancara dengan beliau tanggal 8 April 2019 menambahkan:

Dari adanya kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa Gareccing dari pembangunan yang telah dihasilkan diharapkan pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat serta masyarakat di wilayah lingkungan Desa Gareccing dan dapat menikmati hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan, dari hasil informasi yang diperoleh bahwa dalam proyek atau kegiatan pembangunan yang telah dihasilkan di Desa Gareccing sudah cukup memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, baik itu pembangunan fisik yang dihasilkan di Desa Gareccing yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah.

Pernyataan diatas kemudian dicocokkan dengan telaah dokumen mengenai Tanggul/Talud Irigasi Suplesi Balangpangi,berikut tampilan yang difoto atau diabadikan:

Gambar 7
Tanggul/Talud Irigasi Suplesi Balangpangi





Gambar diatas adalah foto Tanggul/Talud Irigasi Suplesi Balangpangi, penggolongan infrastruktur tersebut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur pemerintah seperti asilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi seperti yang terlihat pada gambar tersebut diatas.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan di Desa Gareccing mencakup berbagai hasil pembangunan yang sudah tercapai, dilihat berhasil atau tidaknya apabila dalam penilaian orang banyak dianggap telah baik dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat banyak.

a. Penilaian Terhadap Program Yang Berjalan

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum tercapai. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Bapak Irwan Parenrengi, pada tanggal 5 April

2019 di kantor Desa Gareccing, ketika ditanyakan mengenai cara masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap program yang sedang berjalan, beliau mengatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan pembangunan secara bersama, seperti partisipasi dalam mengikuti kegiatan pembangunan desa. Pembangunan akan cepat terealisasi jika masyarakat ikut terjun dalam pelaksanaannya.

Dari penjelasan diatas yakni jika pembangunan ingin cepat terealisasi maka masyarakat harus ikut terjun dalam pelaksanaannya karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pembangunan desa secara bersama.

Bapak Muhammad Harifuddin selaku Kelompok Tani saat wawancara di kantor Desa Gareccing pada tanggal 8 April 2019, beliau menambahkan sebagai berikut:

Pembangunan yang berlangsung ialah untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

BAB V

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai merupakan pokok penelitian permasalahan ini yaitu: Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan Partisipasi dalam evaluasi.

A. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Konsep Cohen dan Uphoff partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

1. Kehadiran Rapat

Dari hasil analisis data yang diperoleh terkait dengan kehadiran rapat hal ini dilakukan agar seluruh peserta forum dapat menyampaikan aspirasinya, dengan melihat antusiasme masyarakat dalam menghadiri rapat yang dilaksanakan juga diharapkan agar partisipasi masyarakat terus meningkat.

Melalui partisipasi aktif dari masyarakat yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat. Peran dan kinerja pemerintahan desa disini juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Desa Gareccing sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan desa.

Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, tumbuh berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan dalam setiap pembangunan.

Hasil telaah dokumen daftar hadir kegiatan rapat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pada tahun 2018 sebanyak 28 orang yang menghadiri rapat tersebut yang bertempat di

Rumah Waris Desa Gareccing dan terlihat warga sangat antusias dalam menghadiri rapat yang diselenggarakan.

2. Diskusi

Dalam pelaksanaan musyawarah desa ini pemerintah setempat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan. Pada saat kegiatan ini berlangsung masyarakat bisa dengan leluasa memberikan masukan dan tanggapan demi kemajuan desanya. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat.

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat dilibatkan secara langsung sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.

Musyawarah dilakukan dalam rangka peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program pembangunan yang telah disusun.

Hasil telaah dokumen mengenai diskusi yang sedang berjalan dalam musyawarah desa tentang Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), bahwa semua yang ada dalam diskusi turut andil dalam setiap kegiatan yang mana musyawarah dilakukan dalam rangka peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program pembangunan yang telah disusun.

3. Sumbangan Pemikiran

Bentuk partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan Desa Garecing yaitu berupa kehadiran dalam pertemuan, memberikan informasi tentang keadaan dan potensi desa, selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bahkan kritikan yang tentunya sangat membangun. Partisipasi seseorang atau kelompok masyarakat Desa Garecing sangat berperan dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran.

Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah di butuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan.

Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikirannya dapat di salurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Desa Gareccing dalam pembangunan dengan bentuk ide atau pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan.

4. Tanggapan atau Penolakan

Tanggapan atau penolakan mengenai pelaksana program pembangunan sangat jarang terjadi, berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa pembangunan yang dilakukan di Desa Gareccing semuanya sesuai dengan perencanaan awal pembangunan dan dengan regulasi yang ada, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.

Melalui pemberian Dana Desa ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di pedesaan, memberi manfaat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui bantuan tersebut diharapkan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam program pembangunan.

Hasil dokumentasi APBD Desa Gareccing tahun 2018 sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai pendapatan desa dan belanja Desa Gareccing.

B. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Konsep Cohen dan Uphoff partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Didalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

1. Sumbangan Materi

Hasil analisis data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa antara lain partisipasi dalam bentuk tenaga, selain masyarakat kepala Desa turut andil dalam pembangunan salah satunya pembangunan jalan tani.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk tenaga di Desa Gareccing dilakukan dengan wujud nyata berupa partisipasi dalam bentuk tenaga secara gotong-royong, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Desa Gareccing yang sifatnya seperti gotong royong masyarakat sudah ikut mendukung melaksanakannya.

Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.

2. Keterlibatan Sebagai Anggota Proyek

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Gareccing dalam pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, baik berupa bantuan berupa tenaga maupun pemikiran. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, diantaranya adanya sosialisasi, kesempatan, dan faktor pemimpin.

Keikutsertaan masyarakat dan undangan yang datang secara sukarela untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan, peluang dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan sangat besar. Ini adalah jenis partisipasi yang mana masyarakat menjadi salah satu unsur dalam penentu keberhasilan program pembangunan di Desa Gareccing menuju kearah yang lebih baik dan juga pemerintah desa sangat penting untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat peduli terhadap pembangunan yang ada dan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

C. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Konsep Cohen dan Uphoff partisipasi dalam pengambilan manfaat ini tidak terlepas dari kualitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*.

1. Output

Bentuk *output* yaitu dengan partisipasi dalam pelibatan masyarakat pada tahap pemanfaatan optimal suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Gareccing.

Dari hasil analisis data bahwa banyak manfaat yang langsung dirasakan saat dilakukannya pembangunan di Desa Gareccing salah satunya sarana yang dapat memudahkan petani saat mengangkut hasil sawahnya dari sawah ke jalan raya atau pinggir sawah mereka.

Manfaat dari pembangunan adalah untuk semua masyarakat tanpa memandang status, jabatan, golongan, umur dan lain sebagainya karena pada hakekatnya manfaat dari pembangunan desa adalah untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati.

Berdasarkan hasil telaah dokumen mengenai golongan infrastruktur dasar Tanggul/Talud Irigasi Suplesi Balangpangi bahwa dalam proyek atau kegiatan pembangunan yang telah dihasilkan di Desa Gareccing sudah cukup memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, baik itu pembangunan fisik yang dihasilkan di Desa Gareccing yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah.

D. Partisipasi Dalam Evaluasi

Konsep Cohen dan Uphoff tingkatan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasilnya.

1. Penilaian Terhadap Program Yang Berjalan

Dari hasil analisis data dapat dikatakan bahwa di Desa Gareccing untuk keterlibatan masyarakat dalam hal mengevaluasi hasil pembangunan yang ada di Desa Gareccing sudah dikatakan mampu menilai hasil pembangunan yang telah selesai di lingkungan mereka masing-masing dengan ikut terlibat dalam mengajukan usulan-usulan pembangunan yang telah selesai berjalan.

Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan di Desa Gareccing mencakup berbagai hasil pembangunan yang sudah tercapai, dilihat berhasil atau tidaknya apabila dalam penilaian orang banyak dianggap telah baik dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat banyak. Jika pembangunan ingin cepat terealisasi maka masyarakat harus ikut terjun dalam pelaksanaannya karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pembangunan desa secara bersama, jangan dari satu aspek saja agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen

yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal ini masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Desa Gareccing dalam menghadiri rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang rutin diselenggarakan satu tahun sekali, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut telah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan Musrenbang di desa mereka karena masyarakat Desa Gareccing diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi setiap tahap pembangunan yang dijalankan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan dalam hal ini selain partisipasi aktif masyarakat, peran pemerintah juga sangat diperlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan. Kepala Desa Gare ccing beserta aparatnya cukup aktif dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan

mengarahkan partisipasi masyarakatnya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu infrastruktur dasar yaitu Tanggul/Talud Irigasi Suplesi Balangpangi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desanya. Kegiatan pembangunan ini pemerintah melibatkan masyarakat dalam gotong-royong membangun fasilitas infrastuktur sudah berjalan baik.

3. Pemanfaatan pembangunan yang dihasilkan pada saat ini sudah cukup memberikan manfaat bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi hasil pembangunan di Desa Gareccing cukup baik. Ketika masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (dalam hal penyampaian usulan) masyarakat sudah mampu menilai suatu kondisi yang ada di lingkungan mereka.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan, agar Kepala Desa beserta jajarannya di Kantor Desa semakin menjalin hubungan yang baik dengan wakil-wakil masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT), dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Gareccing, sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di masa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-

gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program pembangunan.

2. Diharapkan pemerintah desa dapat tetap membangun kesadaran kepada masyarakat sehingga terlibat dalam proses pembangunan dan menjadi aktif berpartisipasi dalam setiap pembangunan desa, melalui sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat dapat lebih menyadari betapa pentingnya partisipasi dalam pembangunan di desa.
3. Sebaiknya Kepala Desa dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Gareccing senantiasa untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemeliharaan pembangunan yang telah dihasilkan dari kepedulian masyarakat di Desa Gareccing karena setiap pembangunan di desa harus melibatkan masyarakat mulai dari proses pembahasan program pembangunan sampai dengan evaluasi, sebab yang harus menerima manfaat dari setiap pembangunan di desa adalah semua masyarakat.
4. Sebaiknya pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemerintah desa semata, tetapi juga menuntut keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, secara umum partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipati: Pembangunan Pedesaan dan Perkantoran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ke Tiga: Suatu Pengantar (Susetiawan, Penerjemah)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional)*. Bandung: Alfabeta.
- Kansil, C.S.T. 1985. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, Matthew B. 1994. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bima Wacana Media.
- Soekanto, Soerjono.1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*. Jakarta Pusat: UI Press

- Sudirwo, Daeng. 1981. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Angkasa.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sundariningrum. 2001. *Klasifikasi Partisipasi*. Jakarta: Grasindo
- Supriyadi, Dedi. 2010. *Definisi Partisipasi*. Jakarta: Grasindo.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang. Universitas Negeri Malang: UM Press
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1993. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wazir, Ach. 1999. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Care Project.
- Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negara: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University

Dokumen-dokumen

Pembukaan Undang-Undang 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Desa
3. Waktu Wawancara :
4. Lama Wawancara :

B. Tanggapan Informan

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 - a. Bagaimanakah pendapat Bapak melihat antusiasme masyarakat dalam menghadiri rapat? Apakah semua masyarakat diberitahukan untuk menghadiri rapat tersebut?
 - b. Bagaimanakah cara Bapak untuk mengajak peserta dalam forum tersebut untuk berdiskusi?
 - c. Bagaimana bentuk sumbangan pemikiran yang disampaikan oleh masyarakat? Berapa persen kah peserta yang ikut menyumbangkan ide/gagasan dalam forum tersebut?
 - d. Bagaimana cara Bapak menindaklanjuti apabila peserta mengajukan tanggapan/penolakan? Apakah didengarkan atau dibiarkan saja?
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
 - a. Bagaimanakah bentuk sumbangan materi yang diberikan

oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan? Apakah bentuk sumbangan dari masyarakat tersebut?

- b. Bagaimana upaya Bapak untuk meningkatkan rasa kegotong royongan atau mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap proyek yang akan dilaksanakan?

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

- a. Bagaimana upaya Bapak untuk menghimbau masyarakat dalam Desa Gareccing untuk memanfaatkan pembangunan dengan sebaik mungkin? Apakah masyarakat merasakan hasil/output dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan?

4. Partisipasi dalam evaluasi

- a. Bagaimanakah cara Bapak memberikan arahan apabila ada masyarakat yang memberikan penilaian ataupun kritikan dari pembangunan yang telah dilakukan? Apakah Bapak mempertimbangkan atau membiarkan saja?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua BPD
3. Waktu Wawancara :
4. Lama Wawancara :

B. Tanggapan Informan

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 - a. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang menghadiri rapat di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?
 - b. Bagaimanakah pendapat Bapak melihat partisipasi masyarakat dalam diskusi yang dilakukan? Apa sajakah yang biasa di diskusikan?
 - c. Bagaimana cara Bapak menghimbau masyarakat untuk turut memberikan sumbangan pemikiran terkait program yang akan dilakukan ?
 - d. Bagaimana upaya Bapak dalam memberikan pengarahan apabila ada masyarakat yang mengajukan tanggapan/penolakan?
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
 - a. Bagaimanakah hasil pengamatan Bapak dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan? Apakah ada masyarakat yang memberikan bentuk sumbangan materi/uang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut?
 - b. Menurut Bapak sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau prasarana seperti pengaspalan jalan, dan pembangunan infrastruktur lainnya ?

3. Partiiipasi dalam pengambilan manfaat

a. Bagaimanakah tanggapan Bapak berdasarkan output/keluaran setelah pelaksanaan pembangunan dilaksanakan? Apakah masyarakat mengapresiasi atau tidak?

4. Partisipasi dalam evaluasi

a. Menurut Bapak apakah pembangunan infrastruktur seperti pengaspalan jalan, dan pembangunan lainnya telah terlaksana dan sesuai dengan yang direncanakan? Bagaimana penilaian Bapak/Ibu atas program tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua LPMD
3. Waktu Wawancara :
4. Lama Wawancara :

B. Tanggapan Informan

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 - a. Bagaimanakah upaya Bapak untuk memotivasi masyarakat dalam menghadiri rapat?
 - b. Dalam setiap diskusi yang dilakukan apakah peserta yang hadir dalam forum tersebut semuanya terlibat aktif? Apa sajakah kendala yang terjadi dalam diskusi tersebut?
 - c. Menurut Bapak, siapa sajakah dari peserta dalam forum tersebut yang biasanya aktif dalam menyumbangkan pemikiran, baik itu ide ataupun gagasan? Apa sajakah ide-ide yang dituangkan dalam forum tersebut?
 - d. Bagaimana upaya Bapak apabila dalam forum tersebut ada dari peserta yang mengajukan tanggapan/penolakan? Apakah Bapak menampung setiap tanggapan/penolakan atau membiarkannya saja?
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
 - a. Bagaimanakah bentuk sumbangan materi yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan?
 - b. Menurut Anda sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau prasarana seperti

pengaspalan jalan, dan pembangunan infrastruktur lainnya ?

3. Partiiipasi dalam pengambilan manfaat

a. Bagaimana Output/keluaran yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan? Apakah masyarakat merasakan hasil pembangunan tersebut?

4. Partisipasi dalam evaluasi

a. Setelah pelaksanaan pembangunan dilakukan, apa sajakah yang menjadi penilaian Bapak terhadap program tersebut? Apakah setiap aspirasi dari masyarakat akan di wujudkan atau tidak?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan : Kelompok Tani
3. Waktu Wawancara :
4. Lama Wawancara :

B. Tanggapan Informan

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 - a. Bagaimanakah tanggapan Bapak dalam menghadiri rapat yang diladakan?
 - b. Bagaimanakah perananan Bapak dalam mengikuti diskusi tersebut? Adakah yang ingin Bapak sampaikan dalam diskusi tersebut?
 - c. Bagaimana pendapat Bapak apabila dalam forum tersebut Bapak ditunjuk untuk menyumbangkan pemikiran sebagai salah satu perwakilan dari unsur masyarakat? Apakah yang ingin Bapak sampaikan?
 - d. Dalam sebuah forum biasanya peserta diberikan kesempatan untuk menanggapi/menolak. Apakah Bapak pernah terlibat dalam memberikan tanggapan/penolakan?
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
 - a. Apakah Bapak pernah memberikan sumbangan materi/uang dalam pelaksanaan program pembangunan? Jika ada, berapa nominal yang Bapak berikan? Jika tidak, apa alasan Bapak tidak memberikan sumbangan materi?

b. Apakah Bapak pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan? Bagaimana cara Bapak untuk dapat terlibat didalamnya?

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

a. Apakah Bapak merasakan Output/keluaran dari pembangunan yang dilakukan? Bagaimana cara Bapak memanfaatkan pembangunan yang sudah ada?

4. Partisipasi dalam evaluasi

a. Bagaimanakah upaya Bapak dalam menilai pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan? Adakah masukan atau kritikan yang dapat Bapak sampaikan terkait pembangunan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan : Tokoh Masyarakat
3. Waktu Wawancara :
4. Lama Wawancara :

B. Tanggapan Informan

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 - a. Bagaimanakah tanggapan Bapak dalam menghadiri rapat yang diladakan?
 - b. Bagaimanakah perananan Bapak dalam mengikuti diskusi tersebut? Adakah yang ingin Bapak sampaikan dalam diskusi tersebut?
 - c. Bagaimana pendapat Bapak apabila dalam forum tersebut Bapak ditunjuk untuk menyumbangkan pemikiran sebagai salah satu perwakilan dari unsur masyarakat? Apakah yang ingin Bapak sampaikan?
 - d. Apakah Bapak pernah terlibat dalam memberikan tanggapan/penolakan?
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
 - a. Apakah Bapak pernah memberikan sumbangan materi/uang dalam pelaksanaan program pembangunan? Jika ada, berapa nominal yang Bapak berikan? Jika tidak, apa alasan Bapak tidak memberikan sumbangan materi?
 - b. Apakah Bapak pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan

pembangunan? Bagaimana cara Bapak untuk dapat terlibat didalamnya?

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

a. Apakah Bapak merasakan Output/keluaran dari pembangunan yang dilakukan? Bagaimana cara Bapak memanfaatkan pembangunan yang sudah ada?

4. Partisipasi dalam evaluasi

a. Bagaimanakah upaya Bapak dalam menilai pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan? Adakah masukan atau kritikan yang dapat Bapak sampaikan terkait pembangunan tersebut?

Lampiran 2. Pedoman Telaah Dokumen

PEDOMAN TELAHAH DOKUMEN

A. IdentitasTempat Pengambilan Dokumen

Nama Tempat : Kantor Desa Gareccing
Alamat :Desa Gareccing Kecamatan Sinjai
Selatan Kabupaten Sinjai
Waktu Pengambilan Dokumen : April 2019

B. Dokumen Umum

1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Gareccing
2. Daftar Hadir Musrenbang Tahun 2018
3. Pelaksanaa Rapat Musrenbang Tahun 2018
4. Dokumentasi APBD Desa Gareccing Tahun 2018
5. Pelaksanaan Hasil Pembangunan di Desa Gareccing

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Wahyuningsi, A.Md

Tempat dan Tanggal Lahir : Sinjai, 16 Desember 1993

Alamat : Perumahan Villa Mutiara Indah 8 No 6
Jl. Insinyur Sutami Makassar
No. HP 085340963131
Wahyuningsh022@gmail.com

Agama : Islam

Nama Instansi : Dinas Pariwisata Kota Makassar

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 41 Sinjai Selatan
2. SMP Negeri 1 Sinjai Selatan
3. SMA Negeri 1 Sinjai Selatan
4. D3 LP3I Makassar
5. Masuk STIA LAN Makassar 2016